

PANGSA EKONOMI SEKTORAL DAN TIPOLOGI DAERAH DI WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

Oleh:

Agus Arifin¹⁾ dan Dijan Rahajuni²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Economic potency in region of central Java is interesting to analyze. On 2000 to 2004, this region had referred to structural economic changing. Basic sectors, which was being prime sectors on 2000, has declined the role be the main regional income on 2004. The new cities establishment on this region, late of 90's, may have important role to the structural change. It has driven modern activities that gave significant contribution to regional income.

Nevertheless, regional typology shows the income disparities among the regency on this regions. Especially, the regions with low per capita income and coincide with low economic growth should need to concern. Without appropriate and wise policy, these regions will always left behind from the other regions if they are compared by the regions that have better typology.

Keywords: *economic potency, regional typology, income disparities*

PENDAHULUAN

Menurut Arsyad (1999) perbedaan kondisi daerah membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

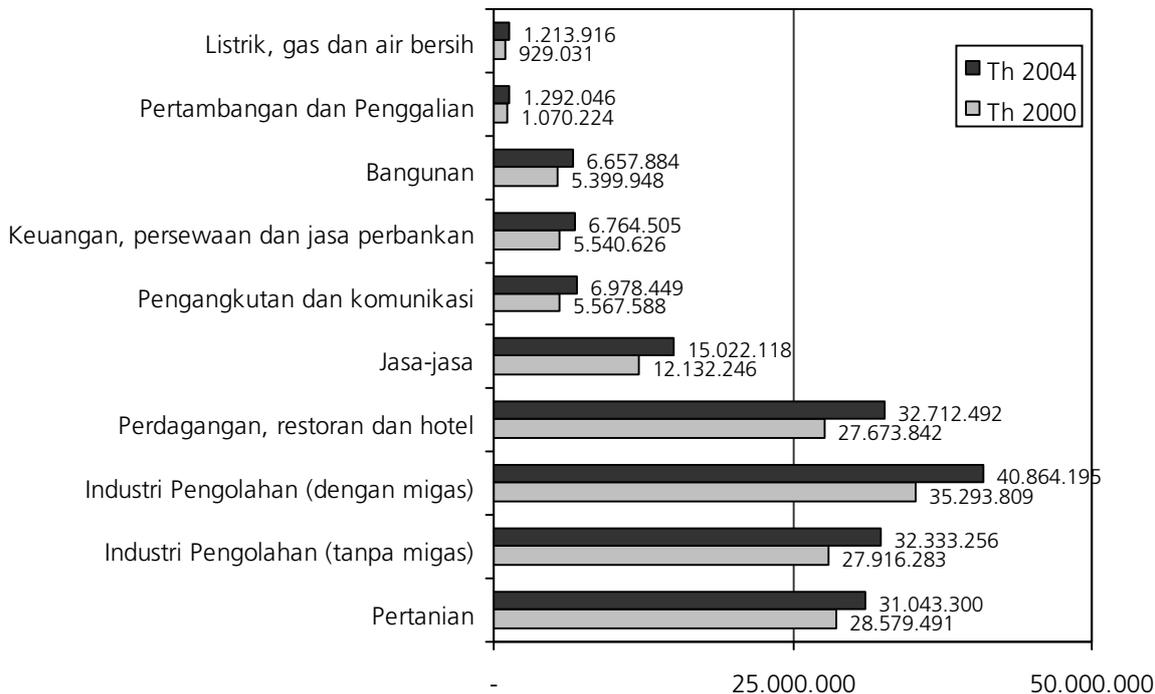
Penelitian ini melihat penentuan potensi sektoral daerah-daerah kabupaten dan kota yang terletak di wilayah Jawa bagian Tengah dan permasalahan tipologi yang melekat sebagai basis pengambilan kebijakan ekonomi.

Wilayah Jawa bagian tengah terdiri dari dua propinsi: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2004, pangsa sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, restoran dan hotel di kedua Propinsi (Jateng bersama-sama dengan DIY) masih mendominasi. Hal ini terlihat dari Grafik 13.1. Pada tahun 2004, ke tiga sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi bagi PDRB total kedua Propinsi sekitar 96 triliun rupiah, atau sebesar 71,70% dari PDRB total Jateng + DIY. Sisanya, 6 sektor lain hanya 1/3 dari total nilai ke tiga sektor tersebut atau menyumbang 28,30% dari PDRB total Jateng + DIY. Ukuran *share* ini belum termasuk nilai PDRB dari sektor minyak dan gas. Jika migas diikut sertakan dalam komposisi pendukung industri pengolahan, ke tiga sektor ekonomi utama memberikan *share* terhadap PDRB total kedua daerah sebesar 73,39%.

Dari grafik 1 terlihat perubahan kontribusi yang jelas antara sektor ekonomi primer (pertanian serta pertambangan dan penggalian) dengan sektor tersier (industri, properti, perdagangan dan jasa lainnya). Bermula dari perubahan kontribusi sektoral wilayah ini, penelitian ini ingin melihat dengan lebih jelas perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi tersebut pada sub wilayah yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota.

Lebih lanjut, sumbangan sub sektor industri pengolahan minyak dan gas merupakan sektor ekonomi spesifik. Sub sektor ini memberikan kontribusi yang besar, sekitar 20,88% dari PDRB sektor industri pengolahan, atau berkisar 5,98% dari total PDRB Jateng + DIY. Dikatakan spesifik, karena aktivitas sub sektor ini hanya terdapat di Kabupaten Cilacap. Daerah kabupaten/kota lain se Jateng DIY tidak memperoleh kontribusi secara langsung dalam perhitungan PDRBnya. Karena besarnya *share* migas dan hanya terlokalisasi spesifik di kabupaten Cilacap saja, sub sektor pengolahan minyak dan gas perlu dikeluarkan dari struktur PDRB propinsi untuk menghilangkan bias analisis.

Dari latar belakang kondisi ekonomi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan basis ekonomi di kabupaten/kota dalam rentang waktu 2000 – 2004. Selain itu, tinjauan tipologi daerah akan digunakan sebagai upaya untuk melihat perbedaan karakteristik sektor-sektor ekonomi di kabupaten/kota tersebut.



Sumber: BPS, data diolah

Grafik 13.1. PDRB Sektoral Jawa Tengah + DIY (Dalam juta Rupiah), 2000 dan 2004

METODE ANALISIS

1. Data

Seluruh data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor ekonomi per kabupaten/kota dan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik pada harga konstan dengan tahun dasar 2000.

2. Pangsa Sektoral

Salah satu cara untuk melihat suatu sektor ekonomi dikategorikan sektor pemimpin adalah dengan melihat kontribusi nilai produksi sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah. Sektor pemimpin ini dipergunakan untuk melihat seberapa besar bagian (*share*) dari nilai produksi setiap sektor ekonomi masing-masing daerah Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kabupaten/Kota tersebut. Secara sederhana sektor pemimpin, pada tahun 2004, untuk daerah-daerah kabupaten/kota di Jawa Bagian Tengah di dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Leading\ Sector_i = \frac{Pr\ oduksi\ Sektor\ S_i\ Kab\ /\ Kota_i}{PDRB_i\ Kabupaten\ atau\ Kota_i}$$

3. Tipologi Daerah

Tipologi Daerah menunjukkan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Tipologi utama pada tulisan ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama; pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Axis ditentukan sebagai berikut: sumbu vertikal menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi, sumbu horizontal menunjukkan pendapatan per kapita daerah. Daerah yang diamati dibagi menjadi empat klasifikasi (tabel 13.1) berikut: daerah cepat maju dan tumbuh (pertumbuhan dan pendapatan tinggi), daerah maju tapi tertekan (pendapatan tinggi tapi pertumbuhan rendah), daerah berkembang cepat (pertumbuhan tinggi tapi pendapatan rendah) dan relatif tertinggal (pertumbuhan dan pendapatan rendah) (Kuncoro, 2004).

Tabel 13.1. Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

		PDRB per kapita	
		$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
Pertumbuhan Ekonomi	$(r_i > r)$	Pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi	Pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi
	$(r_i < r)$	Pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah	Pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

HASIL ANALISIS

Setiap sektor ekonomi menunjukkan *share* yang berbeda-beda terhadap PDRB di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah maupun DIY. Diketahui dari Tabel 2, sektor pertanian pada umumnya menjadi sektor yang paling memberikan kontribusi utama bagi PDRB. Sel berwarna gelap menunjukkan *share* terbesar dari setiap sektor..

Tingginya pangsa sektor pertanian terjadi terutama di daerah berbentuk kabupaten. Sementara untuk wilayah kota, sektor pertanian hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil, dari 0,59% (si Kota Yogyakarta) sampai 16,27% (Kota Pekalongan). Wilayah daerah kota baru hasil pemekaran pada umumnya relatif masih menunjukkan kontribusi sektor pertanian bagi peningkatan PDRB masih penting. Sektor pertanian di Kota Pekalongan dan Kota Tegal masih memberikan pangsa lebih besar dari 16%, hanya kota Magelang yang relatif kecil *share* dari sektor pertaniannya (2,63%).

Wilayah kota cenderung memperoleh pangsa sektor ekonomi terbesar dari sektor ekonomi modern. Kota Yogyakarta, Kota Tegal dan Pekalongan menunjukkan pangsa terbesar bagi PDRB daerah tersebut adalah dari sektor perdagangan, restoran dan hotel. Pangsa terbesar di Kota Semarang dan Surakarta adalah dari sektor industri pengolahan, Kota Salatiga dari sektor pengangkutan dan komunikasi, serta Kota Magelang dari sektor jasa-jasa.

Beberapa kabupaten di Jawa Tengah, sektor pertanian menunjukkan kontribusi lebih dari 50% dari nilai PDRBnya. Kabupaten ini antara lain Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Blora, Rembang, Demak dan Brebes. Di DIY, kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulonprogo memperlihatkan sektor pertanian memberikan kontribusi utama bagi PDRB, tetapi dengan persentase lebih kecil, antara 27,75% sampai 39,26%.

Dari tabel 13.2 diperoleh pula informasi sektor pertambangan dan penggalan memberikan sumbangan paling kecil di semua kabupaten/kota baik di Jawa Tengah maupun DIY. Tertinggi, sektor ini hanya memberikan sumbangan sebesar 6,18% di Kabupaten Kebumen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2000, terdapat beberapa Kabupaten/kota yang menunjukkan perubahan peranan suatu sektor ekonomi. Di kota Semarang, misalnya, pada tahun 2000, kota ini memperoleh kontribusi PDRB terutama dari sektor perdagangan, restoran dan hotel. Pada tahun 2004, pangsa ekonomi utama di kota ini beralih pada sektor industri pengolahan. Di kota Salatiga, sumbangan ekonomi utama pada tahun 2000 dari industri pengolahan dan berganti menjadi sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2004. Tabel 13.3 menunjukkan perubahan komposisi sumbangan sektor-sektor ekonomi pada PDRB di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Tabel 3 menunjukkan untuk kabupaten Batang, semula pada tahun 2000, sumbangan pada PDRB terutama dari sektor pertanian dan pada tahun 2004 beralih ke sektor industri pengolahan. Untuk Tegal, pada tahun 2000, sektor pertanian lebih utama daripada sektor industri pengolahan, pada tahun 2000 industri pengolahan berganti menjadi lebih utama. Hal ini terjadi pula di Kota Magelang yang semula industri pengolahan lebih berperan daripada industri pertanian, tahun 2004 berubah industri pengolahan menjadi lebih utama. Hal ini menunjukkan semakin turunnya kontribusi sektor pertanian bagi peningkatan PDRB di berbagai daerah baik di Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 13.3 menunjukkan pula tidak ada perubahan rangking sumbangan sektor ekonomi pada PDRB di seluruh daerah kota/kab di DIY. Sementara di Jawa Tengah, terdapat 15 daerah kota/kabupaten yang tidak berubah rangkingnya.

Dari sisi kemakmuran ekonomi, masyarakat DIY relatif lebih makmur daripada masyarakat Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di DIY (Halaman Lampiran). Dari perbandingan bentuk daerah, kabupaten dengan kota, daerah berbentuk kota lebih tinggi rata-rata pendapatan per kapitanya maupun pertumbuhan ekonominya. Tabel lampiran ini menunjukkan pula pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 13.2. Sumbangan Sektor-sektor Ekonomi pada PDRB kabupaten/Kota, 2004

Prop - Kab/Kota	Sektor Ekonomi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jawa Tengah	Cilacap	22,55%	1,70%	12,01%	0,51%	1,86%	51,50%	2,48%	2,80%	4,59%
	Banyumas	26,54%	1,60%	20,60%	0,95%	3,83%	16,25%	7,37%	9,20%	13,66%
	Purbalingga	36,00%	0,47%	10,71%	0,91%	5,43%	19,16%	4,42%	4,18%	18,72%
	Banjarnegara	37,04%	0,52%	14,87%	0,43%	5,44%	12,83%	5,12%	5,67%	18,09%
	Kebumen	40,67%	6,18%	10,49%	0,74%	4,25%	11,55%	4,19%	5,49%	16,45%
	Purworejo	36,66%	2,30%	9,16%	0,52%	5,57%	16,61%	5,57%	4,98%	18,62%
	Wonosobo	50,76%	0,74%	11,70%	0,74%	4,19%	12,03%	6,16%	5,40%	8,28%
	Magelang	31,62%	2,34%	19,18%	0,52%	5,11%	16,19%	5,41%	2,69%	16,95%
	Boyolali	35,79%	0,75%	17,13%	0,94%	2,38%	26,36%	2,67%	6,72%	7,26%
	Klaten	24,04%	0,46%	19,44%	0,69%	7,84%	26,59%	2,79%	4,19%	13,95%
	Sukoharjo	23,06%	1,01%	31,46%	1,11%	4,47%	20,87%	4,92%	3,87%	9,22%
	Wonogiri	53,22%	0,79%	4,09%	0,61%	3,17%	13,12%	9,49%	4,12%	11,38%
	Karanganyar	15,12%	0,92%	54,97%	1,15%	2,58%	11,08%	3,30%	2,20%	8,68%
	Sragen	34,73%	1,20%	19,66%	1,13%	2,75%	17,73%	4,45%	3,65%	14,70%
	Grobogan	46,63%	1,21%	3,90%	0,70%	4,70%	19,84%	3,60%	4,42%	15,00%
	Blora	50,20%	2,77%	12,76%	0,53%	3,08%	14,21%	2,62%	6,97%	6,86%
	Rembang	53,85%	2,27%	4,47%	0,43%	3,10%	18,21%	6,18%	3,01%	8,48%
	Pati	36,21%	0,80%	20,58%	1,11%	3,31%	20,23%	2,63%	5,73%	9,39%
	Kudus	4,41%	0,01%	57,65%	0,38%	1,09%	28,97%	2,13%	2,91%	2,46%
	Jepara	24,46%	0,51%	27,97%	0,66%	4,40%	21,51%	5,57%	5,87%	9,04%
	Demak	50,25%	0,21%	16,51%	0,56%	2,26%	17,06%	2,31%	2,62%	8,24%
	Semarang	15,93%	0,13%	47,65%	0,94%	1,23%	18,55%	2,30%	3,75%	9,51%
	Temanggung	36,47%	1,17%	17,83%	0,75%	6,08%	15,69%	5,38%	3,76%	12,87%
	Kendal	23,08%	0,44%	40,94%	1,35%	1,46%	18,42%	2,23%	2,48%	9,59%
	Batang	26,86%	2,17%	29,78%	0,70%	4,81%	16,99%	2,80%	2,95%	12,93%
	Pekalongan	21,27%	1,03%	28,03%	0,75%	4,96%	19,48%	4,19%	5,03%	15,26%
	Pemalang	30,73%	1,06%	17,44%	0,86%	2,64%	30,14%	3,69%	4,21%	9,22%
	Tegal	20,37%	2,31%	27,23%	0,61%	4,38%	26,27%	4,73%	7,26%	6,84%
	Brebes	57,32%	1,11%	9,79%	0,83%	1,86%	20,59%	1,26%	3,24%	4,00%
	Kota Magelang	2,63%	0,00%	3,43%	2,62%	16,44%	6,94%	19,16%	10,63%	38,15%
	Kota Surakarta	0,08%	0,05%	29,70%	2,19%	11,47%	25,09%	9,87%	9,66%	11,90%
	Kota Salatiga	6,43%	0,63%	19,49%	4,38%	4,62%	17,19%	23,74%	6,77%	16,76%
	Kota Semarang	1,11%	0,35%	32,78%	1,23%	9,35%	31,75%	6,33%	4,29%	12,83%
	Kota Pekalongan	16,27%	0,00%	21,19%	0,91%	8,02%	27,07%	7,12%	8,16%	11,25%
	Kota Tegal	16,04%	0,00%	14,83%	2,43%	7,44%	24,12%	14,40%	9,82%	10,92%
DIY	Kulonprogo	27,75%	0,91%	16,02%	0,59%	4,49%	16,23%	10,03%	6,02%	17,97%
	Bantul	24,80%	1,06%	20,29%	0,86%	8,32%	18,81%	6,65%	6,06%	13,17%
	Gunung Kidul	39,26%	2,17%	11,86%	0,48%	7,33%	14,18%	6,68%	4,36%	13,67%
	Sleman	17,53%	0,38%	16,91%	0,83%	9,44%	21,26%	5,50%	10,20%	17,94%
	Kota Yogyakarta	0,59%	0,01%	12,06%	1,36%	6,85%	25,19%	18,15%	13,95%	21,83%

Sumber: BPS, data diolah

Pada analisis tipologi daerah, basis data utama yang dipergunakan adalah pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Pada tipologi ini, daerah-daerah dibagi menjadi empat klasifikasi; Kuadran I (Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi), Kuadran II (pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi),

Kuadran III (Daerah dengan pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, serta Kuadran IV (Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah). Grafik 2 menunjukkan tipologi daerah tersebut, sementara Tabel 13.4 memperlihatkan daerah-daerah di kabupaten/kota se Jawa dan DIY yang terklasifikasi menurut jenis tipologi ini.

Tabel 13.3. Perubahan Rank Sumbangan Sektor Ekonomi pada PDRB, 2000 dan 2004

Prop - Kab/Kota	Sektor Ekonomi																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04
Jawa Tengah Cilacap	2	2	8	8	3	3	9	9	7	7	1	1	6	6	5	5	4	4
Banyumas	1	1	8	8	2	2	9	9	7	7	3	3	6	6	5	5	4	4
Purbalingga	1	1	9	9	4	4	8	8	5	5	3	2	6	6	7	7	2	3
Banjarnegara	1	1	8	8	3	3	9	9	5	6	4	4	7	7	6	5	2	2
Kebumen	1	1	5	5	3	4	9	9	7	7	4	3	8	8	6	6	2	2
Purworejo	1	1	8	8	4	4	9	9	5	6	3	3	6	5	7	7	2	2
Wonosobo	1	1	9	9	3	3	8	8	7	7	2	2	5	5	6	6	4	4
Magelang	1	1	8	8	2	2	9	9	6	6	3	4	5	5	7	7	4	3
Boyolali	1	1	8	9	3	3	9	8	7	7	2	2	6	6	4	5	5	4
Klaten	1	2	9	9	3	3	8	8	5	5	2	1	7	7	6	6	4	4
Sukoharjo	2	2	8	9	1	1	9	8	6	6	3	3	5	5	7	7	4	4
Wonogiri	1	1	8	8	6	6	9	9	7	7	2	2	4	4	5	5	3	3
Karanganyar	2	2	9	9	1	1	8	8	6	6	3	3	5	5	7	7	4	4
Sragen	1	1	8	8	2	2	9	9	7	7	3	3	5	5	6	6	4	4
Grobogan	1	1	8	8	6	6	9	9	4	4	2	2	7	7	5	5	3	3
Blora	1	1	7	7	3	3	9	9	6	6	2	2	8	8	5	4	4	5
Rembang	1	1	8	8	5	5	9	9	6	6	2	2	4	4	7	7	3	3
Pati	1	1	9	9	3	2	8	8	6	6	2	3	7	7	5	5	4	4
Kudus	3	3	9	9	1	1	8	8	7	7	2	2	6	6	4	4	5	5
Jepara	2	2	9	9	1	1	8	8	7	7	3	3	5	6	6	5	4	4
Demak	1	1	9	9	3	3	8	8	7	7	2	2	6	6	5	5	4	4
Semarang	3	3	9	9	1	1	8	8	7	7	2	2	6	6	5	5	4	4
Temanggung	1	1	8	8	2	2	9	9	5	5	3	3	6	6	7	7	4	4
Kendal	2	2	9	9	1	1	7	8	8	7	3	3	6	6	5	5	4	4
Batang	1	2	8	8	2	1	9	9	5	5	3	3	7	7	6	6	4	4
Pekalongan	2	2	8	8	1	1	9	9	5	6	3	3	7	7	6	5	4	4
Pemalang	1	1	8	8	3	3	9	9	7	7	2	2	6	6	5	5	4	4
Tegal	2	3	8	8	3	1	9	9	7	7	1	2	6	6	5	4	4	5
Brebes	1	1	8	8	3	3	9	9	6	6	2	2	7	7	5	5	4	4
Kota Magel.	6	7	9	9	7	6	8	8	3	3	5	5	2	2	4	4	1	1
Kota Surak.	8	8	9	9	1	1	7	7	3	4	2	2	5	5	6	6	4	3
Kota Salatiga	6	6	9	9	1	2	8	8	7	7	3	3	2	1	5	5	4	4
Kota Semar.	7	8	9	9	2	1	8	7	4	4	1	2	5	5	6	6	3	3
Kota Pekal.	3	3	9	9	2	2	8	8	5	6	1	1	7	7	6	5	4	4
Kota Tegal	2	2	9	9	3	3	8	8	7	7	1	1	4	4	6	6	5	5
DIY Kulonprogo	1	1	8	8	4	4	9	9	7	7	3	3	5	5	6	6	2	2
Bantul	1	1	8	8	2	2	9	9	5	5	3	3	6	6	7	7	4	4
Gunung Kidul	1	1	8	8	4	4	9	9	5	5	2	2	6	6	7	7	3	3
Sleman	3	3	9	9	4	4	8	8	6	6	1	1	7	7	5	5	2	2
Kota Yogya.	8	8	9	9	5	5	7	7	6	6	1	1	3	3	4	4	2	2

Sumber: BPS, data diolah

Dari Grafik 13.2, pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif (sebagaimana terlihat dari slop garis regresinya). Hal ini mencerminkan kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, maupun sebaliknya.

Hampir seluruh daerah kota (kecuali Kota Magelang) berada pada kuadran I, atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi disertai pendapatan per kapita tinggi, relatif terhadap daerah se Jawa Tengah/DIY. Hal ini menunjukkan pembentukan kota-kota yang baru memberikan

probabilitas yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Tipologi daerah menunjukkan pula bahwa terdapat 16 daerah dengan kategori yang buruk, berada di kuadran III; pertumbuhan ekonomi rendah disertai rendahnya pendapatan per kapita. Daerah-daerah ini perlu mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Dari klasifikasi ini, 15 daerah tersebut terletak di Propinsi Jawa Tengah dan 1 daerah kabupaten di DIY.

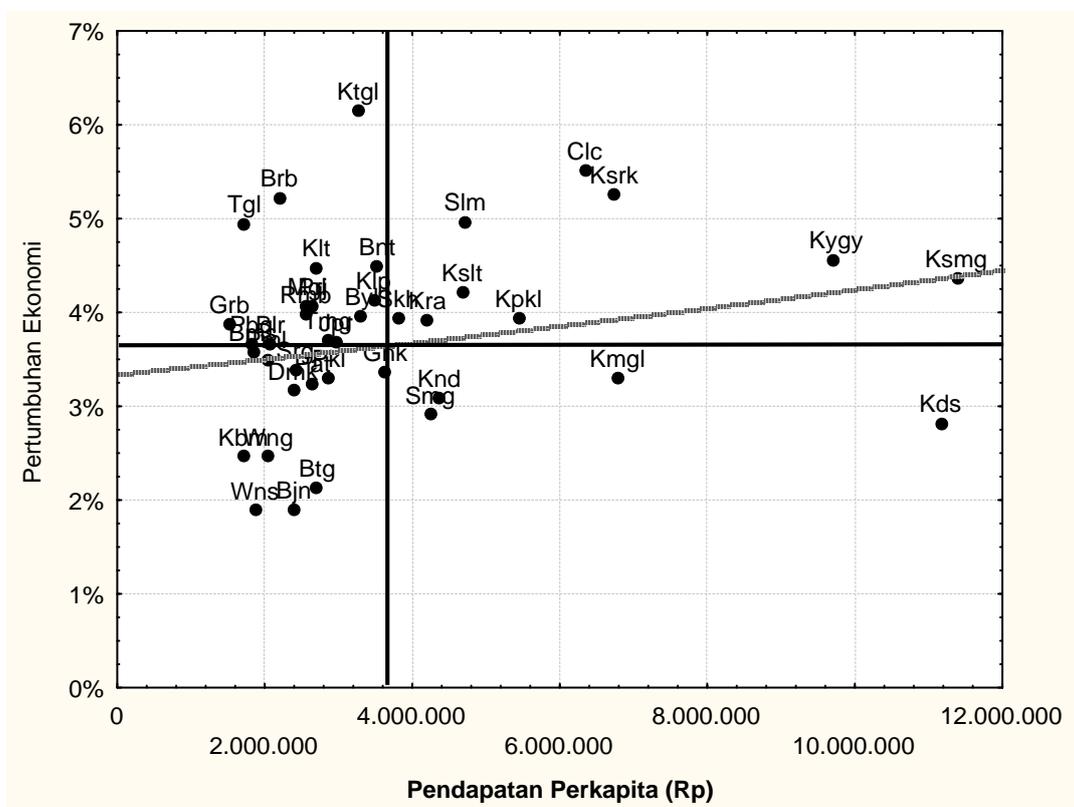
Sebaliknya, pada kuadran I (daerah pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi), terdapat 9 daerah. Pada kuadran I ini,

5 daerah berbentuk kota dan 4 berbentuk kabupaten. Sementara, pada kuadran II terdapat 11 daerah (termasuk 1 daerah berbentuk kota) dan kuadran IV terdapat 4 daerah (termasuk 1 daerah berbentuk kota).

Daerah-daerah di Jawa bagian Tengah menunjukkan kecenderungan berada pada pendapatan per kapita yang rendah. Mayoritas daerah (13 dari 40 daerah) berada pada sisi di atas rata-rata pendapatan per kapita. Pada sisi pertumbuhan ekonomi, cenderung tidak berbeda antara jumlah daerah dengan pendapatan lebih tinggi dengan daerah berpendapatan lebih rendah.

Dengan tingginya jumlah daerah dengan kategori pendapatan per kapita rendah disertai pertumbuhan ekonomi rendah tersebut, menunjukkan proses pembangunan cenderung tidak merata. Terdapat kecenderungan ketimpangan antara daerah kabupaten dengan kota. Dari hal ini dapat ditarik makna, dari karena pembentukan kota baru di Jawa Tengah telah cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat di daerah-daerah kota yang baru tersebut.

Grafik 13.2. Tipologi daerah berdasar Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Per Kapita (rata-rata 2000 – 2004)



Tabel 13.4. Tipologi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Bagian Tengah

		PDRB per kapita	
		<i>Rendah</i>	<i>Tinggi</i>
Pertumbuhan Ekonomi	<i>Tinggi</i>	Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Grobogan, Rembang, Tegal, Brebes, Kota Tegal, Kulonprogo, Bantul	Cilacap, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Sleman, Kota Yogyakarta
	<i>Rendah</i>	Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Sragen, Blora, Pati, Jepara, Demak, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Gunung Kidul	Kudus, Semarang, Kendal, Kota Magelang

Hasil tipologi daerah ini menunjukkan adanya korelasi yang rendah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita. Korelasi Person yang dihasilkan sebesar 0,212 dengan probabilitas kesalahan 18,9%. Meskipun hasil ini bias, grafik tersebut memperlihatkan adanya garis regresi yang cukup jelas dengan slop positif yang menunjukkan hubungan searah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita. Hal ini konsisten dengan keumuman teori ekonomi pembangunan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita..

IV. KESIMPULAN

Potensi ekonomi daerah-daerah di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jawa bagian Tengah menarik untuk dikaji. Dengan populasi penduduk yang relatif tinggi di banding daerah-daerah lain di Pulau Jawa maupun luar Jawa, di daerah ini telah terjadi perubahan struktur perekonomian. Pada tahun 2000, daerah-daerah ini masih cenderung mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama, tetapi pada tahun 2004, sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang semakin menurun. Selain itu, munculnya daerah-daerah berbentuk kota di Jawa Tengah sejak tahun 1999 telah mempengaruhi perubahan perkembangan ekonomi. Munculnya kota baru mendorong semakin tingginya aktivitas ekonomi modern yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB.

Analisis tipologi daerah menunjukkan terdapat beberapa daerah yang kondisi perekonomiannya perlu diwaspadai, terutama daerah dengan klasifikasi pendapatan perkapita rendah disertai pertumbuhan ekonomi rendah pula. Tanpa kebijakan yang tepat, daerah-daerah ini di masa nanti cenderung untuk tetap tertinggal tingkat kemajuan perekonomiannya dari daerah lain. Demikian pula pada daerah dengan pendapatan per kapita tinggi tetapi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan akan mendorong daerah ini menjadi daerah yang lambat kemajuan perekonomiannya, dan dampak lanjutannya adalah penurunan aktivitas perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Jawa Tengah dalam Angka*. beberapa tahun edisi. BPS Jawa Tengah
- _____. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*. beberapa tahun edisi. BPS Jawa Tengah
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.(edisi pertama). BPF. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Wagner. 2000. Regional Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion. *The Journal of Regional Analysis and Policy* (2000)30:2

Lampiran 13.1:

Sektor-sektor Ekonomi:

-
- 1 Pertanian
 - 2 Petambangan dan penggalian
 - 3 Industri Pengolahan
 - 4 Listrik, Gas dan Air Bersih
 - 5 Bangunan
 - 6 Perdagangan, Hotel, Restoran
 - 7 Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan jasa
 - 8 Perusahaan
 - 9 Jasa-jasa
-

Lampiran 13.2:

**Tabel Lampiran: Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Per Kapita,
Jawa Bagian Tengah, Rata-rata Tahunan dari 2000 Sampai 2004**

	Kabupaten/Kota	Singkatan kabupaten	Pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan (2000-2004)	Pendapatan perkapita rata-rata tahunan (2000-2004)
Jawa Tengah	Cilacap	Clc	5,51%	6.343.302
	Banyumas	Bms	3,57%	1.865.466
	Purbalingga	Pbg	3,66%	1.821.408
	Banjarnegara	Bjn	1,90%	2.401.182
	Kebumen	Kbm	2,46%	1.725.367
	Purworejo	Prj	4,06%	2.658.201
	Wonosobo	Wns	1,89%	1.879.690
	Magelang	Mgl	4,07%	2.570.570
	Boyolali	Byl	3,95%	3.302.332
	Klaten	Klt	4,48%	2.696.530
	Sukoharjo	Skh	3,93%	3.811.166
	Wonogiri	Wng	2,46%	2.049.070
	Karanganyar	Kra	3,92%	4.208.437
	Sragen	Sra	3,39%	2.415.720
	Grobogan	Grb	3,87%	1.517.530
	Blora	Blr	3,66%	2.081.393
	Rembang	Rmb	3,98%	2.576.420
	Pati	Pat	3,24%	2.645.224
	Kudus	Kds	2,82%	11.176.729
	Jepara	Jpr	3,69%	2.968.133
	Demak	Dmk	3,16%	2.398.436
	Semarang	Smg	2,91%	4.255.959
	Temanggung	Tmg	3,70%	2.865.494
	Kendal	Knd	3,08%	4.372.758
	Batang	Btg	2,13%	2.707.983
	Pekalongan	Pkl	3,30%	2.875.660
	Pemalang	Pml	3,50%	2.032.715
	Tegal	Tgl	4,94%	1.726.581
	Brebes	Brb	5,22%	2.200.087
	Kota Magelang	KMgl	3,30%	6.802.727
	Kota Surakarta	KSrk	5,25%	6.746.936
	Kota Salatiga	KSlt	4,22%	4.686.620
	Kota Semarang	KSmg	4,36%	11.400.494
Kota Pekalongan	KPkl	3,94%	5.447.342	
Kota Tegal	KTgl	6,15%	3.267.141	
DIY	Kulonprogo	Klp	4,12%	3.480.584
	Bantul	Bnt	4,49%	3.523.098
	Gunung Kidul	Gnk	3,36%	3.630.947
	Sleman	Sle	4,96%	4.730.328
	Kota Yogyakarta	Kygy	4,56%	9.722.680
Rata-rata seluruh daerah			3,78%	3.789.711
Rata-rata Kab/kota di Jateng			3,70%	3.614.309
Rata-rata Kab/kota di DIY			4,30%	5.017.527
Rata-rata daerah kota di Wilayah Jawa Bagian Tengah			4,54%	6.867.706
Rata-rata daerah kabupaten di Wilayah Jawa Bagian Tengah			3,62%	3.136.803